

ABSTRAK

HALIMA TUZ ZAADIAH, 0101 1511 263 “Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Koruptor menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (studi kasus di lapas Kelas IIA Ternate)” dibimbing oleh Mahmud Hi Umar, S.H. M.H., (Pembimbing I) dan Yahya Yunus, SH. MH., (Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat menurut UU no 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan serta dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia bagi Narapidana Koruptor di Lapas Kelas IIA Ternate. (2) mengetahui kendala dan hambatan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat narapidana koruptor sulit memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini adalah secaya yuridis empiris, yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen, pengisian Kuisisioner dan Wawancara yang penulis lakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ternate.

Berdasarkan temuan data yang ada saat ini, Penerima remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana koruptor dalam kurun waktu 2015—2019 masih rendah, sehingga sulit memperoleh keadilan. Adapun faktor-faktor narapidana tipikor sulit menerima remisi dan Pembebasan Bersyarat yaitu adanya Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Kata Kunci : Remisi, Pembebasan Bersyarat, Tipikor, Lapas.